



Article Informations  
Corresponding Email:  
thamidaryani@gmail.com

Received: 08/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI MAROKO DALAM MENANGANI FOREIGN FIGHTERS RETURNEES DARI KONFLIK SURIAH TAHUN 2018-2019**

**Thami Dwi Aryani**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Fenomena kembalinya pejuang asing dari konflik Suriah menghadirkan ancaman yang dapat mengganggu kepentingan Maroko di kawasan. Adanya serangan teror di Maroko yang disebabkan oleh *returnees* Maroko yang pro- IS serta tantangan yang signifikan akibat meningkatnya jumlah kembalinya *foreign fighters* Maroko dari konflik Suriah pasca kekalahan kelompok IS oleh SDF (*Syrian Democratic Forces*) menimbulkan risiko dan ancaman berkelanjutan yang berkaitan dengan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Oleh karenanya, untuk menangani ancaman tersebut Maroko melakukan kerja sama internasional yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negerinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Maroko dalam menangani *foreign fighters returnees* dari konflik Suriah pada tahun 2018- 2019.

**Kata Kunci:** Kebijakan Luar Negeri, *Foreign Fighters Returnees*, Kerja sama Internasional, Maroko

### **Abstract**

*The phenomenon returnees of foreign fighters from the Syrian conflict poses a threat that could disrupt Moroccan interests in the region. There are terrorist attacks in Morocco caused by pro-IS Moroccan returnees as well as significant challenges arising from the increasing number of returns of foreign fighters from the Syrian conflict following the defeat of the IS group by the SDF (Syrian Democratic Forces) poses risks and continuing threats associated with terrorism and violent extremism. Therefore, to deal with the threat, Morocco has implemented international cooperation in its foreign policy. The study aims to comprehensively describe Moroccan foreign policy in dealing with foreign fighters returnees from the Syrian conflict in 2018-2019.*

**Keyword:** Foreign Policy, Foreign Fighters Returnees, International Cooperation, Morocco

## **PENDAHULUAN**

Keamanan dalam Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran yang signifikan, dari konsep keamanan tradisional yang berfokus pada ancaman militer menuju konsep keamanan non-tradisional yang bersifat "*human security*". Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam pola ancaman yang tidak lagi terbatas pada konflik antar negara, tetapi juga mencakup berbagai aspek non-tradisional yang melibatkan aktor non-negara dan bersifat transnasional. Salah satu isu utama dalam kerangka keamanan non-tradisional adalah fenomena pejuang asing (*foreign fighters*) yang terlibat dalam konflik di luar negara asal mereka. Menurut David Malet, *foreign fighters* didefinisikan sebagai "*non-citizens of conflict states who join insurgencies during civil conflict*" (Malet 2009). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *foreign fighters* (FF) merujuk pada individu yang meninggalkan negara asal untuk bergabung dengan kelompok pemberontak dalam konflik di luar negara asalnya.

Fenomena ini menjadi semakin penting dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi, dan media komunikasi yang mempermudah mobilisasi individu untuk bergabung dalam konflik internasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah konflik Suriah, yang menarik ribuan pejuang asing dari berbagai negara, termasuk Maroko. Konflik Suriah dipicu adanya ketidakpuasan terhadap rezim Bashar al-Assad dan berkembang menjadi perang sipil yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak dan aktor internasional, termasuk kelompok jihadis seperti *Islamic State* (IS). Keterlibatan pejuang asing dalam konflik Suriah, khususnya dari Maroko, telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi ancaman keamanan ketika mereka kembali ke negara asal sebagai *returnees foreign fighters*. Ancaman ini menjadi nyata dengan terjadinya beberapa serangan teror di Maroko yang terkait dengan individu yang kembali dari Suriah. Oleh karena itu, respons yang efektif dari kerajaan Maroko yaitu melalui kerja sama internasional yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negerinya menjadi sangat penting dalam menangani masalah ini.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Maroko dalam menangani *returnees foreign fighters* dari konflik Suriah pada tahun 2018– 2019. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Maroko dan langkah-langkah yang diambil dalam menangani masalah tersebut guna menjaga stabilitas dan keamanan nasional serta regional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena kembalinya pejuang asing (*foreign fighters returnees*) dari konflik Suriah dan dampaknya bagi keamanan dan kepentingan Maroko. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi dan peristiwa secara sistematis berdasarkan fakta yang disajikan menggunakan berbagai data pendukung seperti gambar, grafik, dan tabel (Bakry 2017). Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data-data yang diperoleh didapatkan dari buku, jurnal, artikel, koran, skripsi, thesis, laporan, dokumen pemerintah maupun website resmi yang berbasis internet yang dipublikasikan melalui media massa lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya analisis data dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Terdapat 3 unsur analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dari proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian singkat kemudian proses akhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Sugiyono 2012)

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Neo-Realisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, yang memandang sistem internasional yang anarkis sebagai faktor utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya kepentingan nasional, keamanan dan kelangsungan hidup negara dalam menghadapi tantangan global termasuk isu keamanan non-tradisional seperti fenomena kembalinya pejuang asing yang berkaitan dengan isu terorisme (Jackson dan Sorensen, terj

Dadan Suryadipura). Pendekatan neo-realisme digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Maroko dalam menangani ancaman yang disebabkan oleh *foreign fighters returnees* dari konflik Suriah. Kebijakan luar negeri adalah tindakan dan strategi yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional sekaligus untuk menangani suatu permasalahan (Holsti 1983). Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional serta dipengaruhi oleh nilai dan instrumen tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri Maroko dianalisis untuk memahami bagaimana Maroko menangani ancaman terorisme yang muncul dari kembalinya *foreign fighters*.

## **PEMBAHASAN**

Pejuang asing (*foreign fighters*) Maroko telah terlibat dalam berbagai konflik internasional selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam konflik-konflik yang terjadi. Beberapa konflik yang disoroti karena adanya partisipasi FF Maroko di dalamnya, yaitu konflik di Afghanistan (1979-1992), Bosnia (1992-1995), Chechnya (1994), Irak (2003) dan konflik Suriah (2011).

Pada tahun 1980, selama terjadinya konflik antara Soviet-Afghanistan telah menarik perhatian pejuang asing dari berbagai negara, termasuk Maroko. Pejuang Maroko bergabung dengan pasukan mujahidin Afghanistan untuk melawan invasi Soviet (Masbah 2015). Setelah konflik berakhir, beberapa FF Maroko memutuskan untuk kembali ke negaranya untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraannya namun yang lainnya memutuskan untuk meneruskan perjuangan jihadnya dengan membentuk kelompok jihadis yaitu *Groupe Islamique Combattant Marocain* (GICM) yang berpusat di Maroko dan berafiliasi dengan Al-Qaeda. Konflik Afghanistan menjadi awal munculnya ideologi jihad dan solidaritas lintas negara mendorong keterlibatan pejuang asing di dalamnya.

Selanjutnya pada tahun 1992, pecahnya konflik di Bosnia kembali menarik FF Maroko datang ke Bosnia untuk membantu Muslim Bosnia melawan kekerasan dan serangan pasukan Serbia yang telah melakukan pembantaian dan pembersihan etnis terhadap Muslim Bosnia dalam operasi militer yang dilakukan oleh Radovan Karadzic (Counter Extremism Project 2020). Konflik Bosnia dilihat sebagai konflik antar etnis Bosnia, etnis Serbia, dan etnis Kroasia Katolik, namun banyak merugikan etnis Muslim Bosnia sehingga faktor tersebut yang memotivasi pejuang asing untuk terlibat. Namun setelah konflik Bosnia berakhir, beberapa FF memutuskan untuk meneruskan perjuangannya ke Kaukasus Utara.

Munculnya konflik di Chechnya pada tahun 1994 disebabkan oleh invasi yang dilakukan oleh Rusia di bawah komando Boris Yeltsin karena Rusia menolak kemerdekaan Chechnya. Berbagai kekerasan dan kekejaman yang dilakukan selama periode invasi yang dilakukan pasukan Rusia kepada warga sipil Chechnya memicu munculnya motivasi FF untuk memberikan keadilan bagi Muslim Chechnya dan melawan invasi Rusia. Kehadiran FF dari berbagai negara dimobilisasi oleh Fathi Mohammed Habib. Selain itu, para FF juga diberikan pelatihan tempur dan taktik militer untuk mengatur serangan militer ke pasukan Rusia oleh Emir Khattab. FF Maroko yang terlibat dalam konflik ini memiliki peran sebagai fasilitator (Donnelly, Sanderson dan Fellman 2017). Salahuddin Beniyach adalah salah satu FF Maroko yang pernah terlibat dalam konflik Chechnya bersama brigade Khattab (Botha 2008), yang ditangkap oleh pihak keamanan Spanyol karena diduga akan merencanakan serangan di Madrid. Meskipun demikian tidak ada sumber yang menyebutkan mengenai banyaknya jumlah FF Maroko pada konflik Chechnya.

Kemudian konflik yang terjadi pada abad ke-20 yang melanda Irak, disebabkan karena invasi yang dilakukan oleh AS terhadap Irak yang membuat FF Maroko bersama dengan pejuang dari negara lain bergabung dengan kelompok pemberontak untuk melawan pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS. Dalam konflik ini diperkirakan sebanyak 200 sampai 300 FF Maroko melakukan perjalanan ke Irak dan turut berpartisipasi dalam pertempuran

(Berrada 2019). Kehadiran FF di Irak dimobilisasi oleh kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan Al-Qaeda in Iraq (AQI) sehingga ideologi radikal yang mereka anut seringkali mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan. Dalam catatan militer AS menunjukkan bahwa banyak FF asal Libya dan Maroko yang ditugaskan sebagai pelaku bom bunuh diri yang menargetkan pasukan keamanan AS di Irak (Byman 2015).

Konflik selanjutnya yang diikuti oleh keterlibatan FF Maroko di dalamnya yaitu konflik Suriah. Konflik ini dipicu karena adanya gelombang *Arab Spring* yang melanda kawasan Timur Tengah yang menuntut adanya perubahan sistem pemerintahan di Suriah. Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 setelah terjadi ketegangan antara rakyat Suriah dengan rezim Bashar al-Assad. Ketika ketegangan yang terjadi di Suriah, muncul lah kelompok pemberontak untuk melawan rezim al-Assad dan kelompok yang paling disorot dalam konflik ini adalah kelompok *Islamic State* (IS).

Konflik Suriah menjadi konflik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan di dalamnya sekaligus menjadi medan pertempuran bagi ribuan pejuang asing. Sebagian besar dari pejuang asing yang terlibat dalam konflik ini bergabung dengan kelompok IS, yang memanfaatkan ideologi ekstremis untuk menarik pejuang asing dari seluruh dunia. Kelompok IS memanfaatkan kemajuan teknologi dalam era globalisasi ini dalam menyebarkan narasi-narasi jihad kepada pejuang asing untuk mendirikan negara Kekhalifahan di Suriah. Narasi yang dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi disebarkan melalui media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* dengan menampilkan kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad kepada warga sipil Suriah dan upayanya tersebut berhasil dalam menarik lebih banyak perhatian FF dari berbagai negara termasuk FF Maroko.

Kedatangan FF Maroko ke Suriah dibagi menjadi 3 gelombang utama. **Gelombang pertama**, FF Maroko mulai memainkan perannya pada tahun 2012 dan sebagian besar dari mereka adalah mantan pejuang yang sebelumnya tergabung dalam kelompok AQI. Namun di Suriah, mereka bergabung bersama kelompok *Jabhat al-*

*Nusra* (JAN) yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Joulani (Masbah, Moroccan Fighters in Syria 2014). Salah satu contoh keterlibatan FF Maroko bersama kelompok JAN yaitu ketika FF Maroko yang bernama Abu Ayman dari Casablanca melakukan serangan bom bunuh diri di pos pemeriksaan tentara di Qusayr sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Assad sekaligus untuk menunjukkan eksistensi kelompok JAN.

**Gelombang kedua**, kedatangan FF Maroko pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 500-700 orang tiba di Suriah, yang direkrut oleh kelompok *Sham al-Islam* yang dipimpin oleh Ibrahim Benchekroun (Masbah, 2014). Selanjutnya, **gelombang ketiga**, FF Maroko tiba pada tahun 2014 dengan jumlah lebih dari 900 orang dan terindikasi bergabung dalam kelompok IS (Berrada, hal 24). Beberapa wilayah Maroko yang mengeksport lebih banyak FF Maroko ke Suriah meliputi wilayah Tangiers, Fnideq, Tetouan, Salé, Fez, dan Casablanca. Jumlah ketelibatan FF Maroko dalam konflik Suriah terus meningkat menjadi sekitar 1.600-2.000 orang pada tahun 2015-2016, di dalamnya termasuk 275 perempuan Maroko (Watanabe 2018).

Adapun faktor pendorong dan motivasi yang melatarbelakangi FF Maroko berpartisipasi dalam konflik Suriah, mulai dari segi ekonomi yang sulit hingga dorongan ideologis yang kuat. Namun pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa propaganda yang dilakukan IS memainkan peranan penting dalam menarik sebagian besar pemuda Maroko untuk datang ke Suriah dan bergabung dengan kelompok IS. IS mempublikasikan video yang menampilkan kehidupan yang tampak mewah di Suriah. Video tersebut membuat pemuda Maroko yang memiliki ekonomi rendah melihat hal tersebut sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Selain itu, pengaruh tokoh Salafi lokal yang seringkali mempromosikan pandangan keagamaan dan ideologi yang ekstrim juga dapat menginspirasi warga Maroko untuk melakukan jihad ke Suriah. Motivasi dan faktor pendorong tersebut berpengaruh pada peningkatan jumlah FF Maroko yang meninggalkan negara asalnya untuk pergi ke Suriah dan terlibat dalam konflik bersama kelompok IS.

FF Maroko yang bergabung dengan kelompok IS memainkan peran penting dalam berbagai serangan IS di Suriah. FF Maroko yang bernama Abdelaziz al-Mahdali (merupakan seorang pedagang asal Fnideq), yang ditugaskan menjadi komandan pasukan untuk melancarkan serangan kepada kelompok *Jabhat al-Nusra* di Aleppo (Security Assessment in North Africa 2015). Serangan tersebut ditujukan sebagai upaya IS dalam melawan kelompok atau siapapun pihak yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi IS hingga akan mengganggu kepentingannya di Suriah. Dalam hal ini diketahui bahwa kelompok IS dan JAN memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda di Suriah. Sedangkan di wilayah lain, Abu Sohaib al-Maghrebi salah satu FF asal Maroko yang juga ditugaskan untuk memimpin serangan ke pos pemeriksaan militer Suriah di Deir al-Zour yang kemudian menewaskan sebanyak 25 tentara dan korban luka lainnya (Security Assessment in North Africa 2015). Peran FF Maroko dalam konflik Suriah terutama yang bergabung dengan kelompok IS lebih banyak dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri atau *Inghimassyin* (Masbah, Transnational Security Challenges in North Africa: Moroccan Foreign Fighters in Syria 2012-2016).

Namun pada tahun 2017, peran FF Maroko mulai berubah ketika kelompok IS memasukkan 3 *fighters* Maroko ke dalam posisi penting dalam jajaran kelompok IS, diantaranya sebagai Hakim di Mosul, pejabat di Kementerian Komunikasi, dan Gubernur di Gunung Turksmen (wilayah Utara Latakia Suriah). Dan diperkirakan sekitar 929 FF Maroko masih aktif bertempur bersama kelompok IS dalam pertempuran koalisi udara AS di Raqqa dan Mosul dan sebanyak 596 FF Maroko tewas dalam pertempuran tersebut (Masbah, Transnational Security Challenges in North Africa: Moroccan Foreign Fighters in Syria 2012-2016). Sedangkan sebanyak 213 FF Maroko memutuskan untuk kembali ke negara asalnya yang dianggap sebagai *returnees* (Security Assessment in North Africa , hal 4). *Returnees* merupakan istilah yang merujuk pada pejuang asing yang telah berhasil mencapai wilayah konflik dan bergabung pertempuran bersama kelompok ekstremis yang kemudian memutuskan untuk kembali ke negara

asalnya dan bukan karena di deportasi (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2021).

Menurut laporan CTED, kembalinya FF dari zona konflik ke negara asal mereka akan menimbulkan risiko berkelanjutan di masa depan. FF *returnees* seringkali menghadirkan ancaman terorisme domestik yang kuat dan cenderung lebih radikal dalam menyebarkan ideologi ekstemisme. Selain itu, FFR juga berpotensi dalam membentuk jaringan teroris baru atau bahkan menghidupkan kembali jaringan teror yang sudah mati. FFR dapat berperan sebagai fasilitator yang merekrut pejuang baru untuk dikirim ke wilayah konflik. Ancaman yang dihadirkan FFR membawa dampak nyata terhadap serangan teroris langsung, pembentukan sel teroris yang radikal, perekrutan anggota baru, dan terkoneksi dengan kelompok teroris global. Meskipun tidak semua *returnees* membawa ancaman teroris namun secara universal FFR dipandang sebagai teroris oleh publik dan badan keamanan (Hoffman dan Furlan 2020). Pandangan tersebut muncul karena sebagian besar dari mereka telah mendapatkan pelatihan militer dalam menggunakan senjata dan membuat bahan peledak serta terlibat dalam berbagai tindak kekerasan.

Maroko menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari gelombang kembalinya FF. Maroko telah mengalami setidaknya 3 serangan teror yang disebabkan oleh *returnees* yang teradikalisasi. Pertama, serangan bom di Casablanca tahun 2003, kedua yaitu serangan bom di Marrakesh tahun 2011, dan serangan ketiga terjadi pada tahun 2018 di Imlil yakni tindakan pembunuhan yang menewaskan dua turis asal Denmark dan Norwegia. Pelaku penyerangan ini merupakan FFR pro-IS yang telah kembali dari Suriah dan terafiliasi dengan kelompok IS. Meskipun dampak serangan teroris pada tahun tersebut relatif rendah namun ancamannya tetap nyata.

Ancaman teror yang dialami Maroko akan semakin meningkat terutama ketika kelompok IS berhasil dikalahkan oleh pasukan SDF pada tahun 2019. Berakhirnya kekuasaan kelompok IS di Suriah akan berdampak pada peningkatan jumlah FF *returnees* ke Maroko. Pada periode tersebut diperkirakan sekitar 900 FFR

Maroko akan kembali ke Maroko termasuk perempuan dan anak-anak (Berrada 2019).

Untuk menanggapi ancaman ini, kerajaan Maroko merespon melalui dua kebijakan yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Kebijakan *hard approach* Maroko mencakup fenomena pejuang asing yang ditangani secara keseluruhan dalam kerangka hukum pemberantasan terorisme (Berrada 2019). Meskipun kerajaan Maroko mengizinkan FF Maroko kembali dari Suriah pasca kekalahan kelompok IS, namun bagi mereka yang terbukti pernah bergabung dengan kelompok IS dan terlibat dalam aksi teror akan ditangkap dan diadili sesuai dengan Undang-Undang terkait terorisme. Kebijakan *hard approach* yang diambil kerajaan Maroko melalui tindakan hukum merupakan tindakan represif untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada FFR Maroko yang pernah terlibat dalam percobaan, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan teror yang dilakukan, baik di dalam maupun luar Maroko.

Selanjutnya, Maroko menerapkan kebijakan *soft approach* yang bersifat preventif melalui kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme yang mencakup penanganan masalah kembalinya pejuang asing dari konflik Suriah. Maroko telah menjalin kerja sama dengan negara Indonesia, terlibat aktif dalam program UNODC ROMENA di kawasan, dan aktif menjadi *Co-chairs Global Counter Terrorism Forum* untuk berbagi informasi (*sharing information*) dan melakukan lokakarya serta pelatihan dalam menghadapi ancaman ini.

### **1. Kerja Sama Dalam Berbagi Informasi (*Sharing Information*) Menegenai Masalah FF *Returnees* Dengan Negara Indonesia**

Pada Oktober 2019, Maroko dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pertukaran informasi terkait isu-isu radikalisme dan terorisme, termasuk penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (Pramudyani 2019). Kerjasama ini meliputi berbagi informasi tentang peraturan, kebijakan, strategi, dan intelijen terkait terorisme serta memperkuat kapasitas penegakan hukum. Adapun

beberapa poin kerja sama yang disepakati oleh kedua negara, yaitu:

- 1) Berbagi informasi tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan strategi nasional terkait dengan penanggulangan terorisme.
- 2) Bertukar pandangan, pengalaman, pelajaran, dan praktik yang baik dalam menanggulangi terorisme.
- 3) Bertukar intelijen dan informasi antara para Pihak terkait dengan terorisme dan kasus pendanaan terorisme, termasuk *foreign terrorist fighters*.
- 4) Meningkatkan kerja sama antara institusi penegak hukum serta institusi lain dari para Pihak dalam mencegah, memberantas, dan menanggulangi terorisme termasuk pergerakan teroris lintas batas.
- 5) Memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui konferensi seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan.
- 6) Saling kunjung antar Pejabat tinggi dan pakar.

Kerja sama diantara kedua negara dilakukan karena Maroko dan Indonesia memiliki kesamaan dimana banyak dari warga negaranya pergi ke Suriah dan bergabung dengan kelompok IS kemudian memutuskan kembali ke negara asalnya untuk merencanakan serangan dan aksi terorisme. Meskipun secara geografis Maroko dan Indonesia jauh namun keduanya menghadapi permasalahan yang sama. Selain itu, terorisme telah menjadi agenda global yang harus ditangani bersama melalui kerja sama internasional untuk memerangi terorisme.

## **2. Melaksanakan *Workshop* dalam Forum Regional dengan *United Nations on Office Drugs and Crime Regional Office for the Middle East and North Africa (UNODC ROMENA)***

Maroko bekerjasama dengan UNODC dan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) dalam sub-program pencegahan dan penanggulangan

terorisme.

UNODC

menyelenggarakan pertemuan bersama negara-negara di kawasan MENA membahas tentang kerja sama dalam pencegahan terorisme yang berfokus pada peradilan pidana khususnya untuk menangani *foreign terrorist fighters* (UNODC 2019). Dalam pertemuan selanjutnya yang diadakan di Mesir berfokus pada pembahasan mengenai pengembalian dan relokasi FTF yang sah menurut hukum, melakukan pertukaran informasi (*sharing information*) mengenai respons masing-masing negara MENA dalam melawan ancaman dari kembalinya FTF dan pembentukan Satuan Tugas Multi-Lembaga Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MATF MENA) yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama antar lembaga yang sesuai dengan kerangka hukum internasional (UNODC 2018).

Pertemuan dan lokakarya yang diselenggarakan oleh UNODC ROMENA menjadi sangat penting dalam merespon secara kolektif mengenai ancaman yang disebabkan oleh FF/FTFs. Kemunculan kelompok IS dalam konflik Suriah mempengaruhi banyaknya FF yang meninggalkan negara asalnya untuk bergabung dengan kelompok IS. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan bagi negara-negara asal terutama dalam menghadapi FF yang meninggalkan zona konflik untuk kembali ke negara asal. Mereka akan menghadirkan ancaman terutama setelah memperoleh pengalaman tempur dan terlibat dalam berbagai kekerasan di zona konflik sehingga mereka dikhawatirkan akan meradikalisasi orang lain setelah kembali ke negaranya.

Oleh karena itu, setiap negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara harus memiliki kesamaan pendapat dan pandangan terkait masalah FF/FTFs dengan memperkuat kerja sama regional dalam melawan berbagai bentuk ancaman terorisme yang muncul akibat fenomena kembalinya FF. Selain itu, diperlukan persiapan dalam pengembalian FF dari zona konflik yang bisa dilakukan dengan berbagi informasi (*sharing information*) antar negara-negara MENA terutama

mengenai pergerakan dan kebijakan penanganan fenomena FF. Dengan Maroko ikut berpartisipasi dalam lokakarya dan setiap pertemuan yang diadakan oleh UNODC ROMENA dalam sub-program pemberantasan terorisme (*countering terrorism*) ini bertujuan agar Maroko dan negara mitra di kawasan MENA dapat meningkatkan kerja sama dan saling bertukar *best practices* dalam menanggulangi dan memberantas terorisme. Upaya tersebut dilakukan oleh Maroko terutama untuk menangani ancaman keamanan yang disebabkan oleh fenomena kembalinya FF yang telah dianggap sebagai terorisme lintas batas.

Oganisasi internasional UNODC-TPB (*United Nations Office on Drugs and Crime-Terrorism Prevention Branch*) yang bergerak di bidang keamanan internasional telah membantu Maroko dalam mencegah dan menangani aksi terorisme khususnya dalam menangani fenomena FF/FTFs *returnees* melalui peradilan pidana terhadap terorisme.

### **3. Berpartisipasi Aktif Dalam Organisasi Internasional Sebagai Co- Chairs Global Counter Terrorism Forum (GCTF)**

Maroko aktif berpartisipasi dalam GCTF, *platform* internasional yang beranggotakan 32 negara yang menerapkan strategi kontra- terorisme secara global. Maroko bersama Belanda dan kemudian Kanada menjadi *co-chairs*, memimpin berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan pemulangan FF dan mengembangkan praktik terbaik dalam mencegah dan menangani terorisme.

Dalam pelaksanaan penanganan fenomena FF/FTFs, Maroko dan Belanda memimpin jalannya Rapat Pleno Tingkat Menteri ke-9 (*the Nineth GCTF Ministerial Plenary Meeting*) yang diselenggarakan pada 27 September 2018 di New York, untuk membahas inisiatif dalam mengatasi tantangan pemulangan keluarga FTFs dan mengembangkan serangkaian *good practices* tentang pencegahan, deteksi, dan respon terhadap terorisme dalam negeri yang tertera dalam “*Initiative Rabat-Washington*” (GCTF 2018). Meskipun inisiatif ini difokuskan

pada upaya domestik untuk mengatasi terorisme dalam negeri namun inisiatif ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi mengenai program pencegahan terorisme lintas batas antar anggota negara GCTF. Inisiatif ini dipimpin oleh Maroko dan AS dibawah naungan *working group* FTF GCTF. Kelompok Kerja (*Working Group*) FTF GCTF dimaksudkan sebagai mekanisme pelaksana untuk mendukung implementasi *The Hague-Marrakech Memorandum* yang berfokus pada pengembalian pejuang teroris asing (*returning FTF*) (GCTF 2018). Adapun lima bidang prioritas yang difokuskan *Working Group* FTF GCTF pada periode 2019 yaitu:

- 1) Mengembangkan dan mempromosikan penggunaan daftar pantauan yang efektif.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama berbagi informasi (*sharing information*) antar lembaga dan pemerintah.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan kerja sama dalam pengawasan perbatasan dan pengelolaan perbatasan yang terkait dengan FTF yang kembali dari zona konflik.
- 4) Melakukan lokakarya, pelatihan, dan praktik yang baik untuk mengintegrasikan kembali para pengungsi yang kembali, termasuk keluarganya.
- 5) Memperkuat kerja sama dalam upaya terkait FTF di seluruh Kelompok Kerja GCTF.

Selanjutnya Maroko dan Belanda menyelenggarakan pertemuan Komite Koordinasi ke-16 GCTF (*the Sixteenth Coordinating Committee Meeting*) pada tanggal 23 September 2019 di New York untuk mengesahkan kerangka kerja GCTF yang baru dalam Rapat Pleno Tingkat Menteri ke-10 (*the Tenth GCTF Ministerial Plenary Meeting*). Di dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita memfokuskan pada upaya memperkuat komitmen untuk

memerangi terorisme kepada negara anggota GCTF. Bourita menegaskan dalam pidatonya bahwa ancaman terorisme masih bisa terjadi di semua kawasan terutama yang berkaitan dengan returnees yang kembali dari zona konflik sehingga pentingnya memperkuat komitmen dalam platform GCTF yang berkelanjutan sebagai dasar ketahanan dari para anggota dalam menghadapi ancaman tersebut.

Dalam Rapat Pleno ke-10 yang diadakan tersebut membahas mengenai “*initiative on improving capabilities for detecting and interdicting terrorist travel through enhanced terrorist screening and information sharing*” dari *working group* yang dipimpin oleh Maroko dan AS. Sebelumnya pada tanggal 13-14 Juni 2019, Maroko dan AS mengadakan lokakarya regional di Rabat yang mengacu pada inisiatif tersebut guna mengembangkan *good practices* bagi anggota negara dan non-negara dalam membuat daftar pantauan dan penyaringan teroris global yang lebih efisien di kawasan Afrika yang berfokus pada melawan arus pergerakan terorisme yang memiliki jaringan internasional termasuk kembalinya pejuang asing (RFF) dari wilayah konflik (GCTF 2018). Kemudian inisiatif tersebut diresmikan dalam dokumen “*New York Memorandum on Good Practices for Interdicting Terrorist Travel*”.

Inisiatif dan dokumen yang telah diresmikan dalam pertemuan pada periode 2018-2019 ditujukan untuk membantu negara-negara anggota termasuk Maroko untuk melakukan kerja sama internasional dengan saling berbagi informasi (*sharing information*) dalam menangani ancaman keamanan yang disebabkan oleh FF yang kembali dari zona konflik terutama yang pernah terlibat dengan kelompok IS. Keterbatasan pemerintah Maroko dalam mendeteksi dan mengatasi radikalisme hingga ekstremisme kekerasan yang dapat mengarah pada pertumbuhan terorisme dalam negeri mendorong Maroko memainkan peran aktifnya dalam organisasi multilateral *Global Counterterrorism Forum*. Upaya yang dilakukan Maroko melalui partisipasinya dalam GCTF bertujuan untuk mengurangi ancaman dari pengungsi yang

kembali sekaligus untuk meningkatkan keamanan perbatasan melalui kerja sama dengan AS.

Kerjasama internasional sangat penting bagi Maroko terutama dalam menangani ancaman yang ditimbulkan oleh FF *returnees*. Melalui berbagi informasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan partisipasi aktif dalam organisasi internasional, Maroko berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menjaga keamanan serta stabilitas regional. Kebijakan luar negeri Maroko yang melibatkan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional menjadi instrumen penting dalam merespon tantangan global terkait terorisme yang disebabkan oleh fenomena kembalinya *foreign fighters* dari konflik Suriah terutama yang pernah bergabung dengan kelompok IS.

## **KESIMPULAN**

Pada beberapa tahun terakhir, meskipun Maroko menjadi negara yang paling rendah mengalami serangan teror dalam skala besar di antara negara-negara kawasannya namun gelombang kembalinya FF *returnees* dari konflik Suriah dianggap dapat menghadirkan ancaman terkait dengan terorisme. Hal tersebut disebabkan karena kehadiran kelompok IS dalam konflik Suriah yang erat kaitannya dengan ekstremisme kekerasan dan teroris. Kepulangan FF *returnees* ke negara asal akan menambah kekhawatiran terlebih ketika kelompok IS berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi SDF pada tahun 2019. Kondisi tersebut akan menciptakan gelombang kembalinya FF dari Suriah ke negara Maroko semakin tinggi. Tingkat radikalisasi yang dipengaruhi oleh kelompok IS akan terbawa ketika *returnees* kembali ke Maroko sehingga dapat berdampak pada munculnya ancaman berupa serangan teror yang dapat dilakukan oleh *returnees* Maroko, baik di dalam dan di luar Maroko. Kebijakan Maroko yang mengizinkan *returnees* untuk kembali ke negaranya menjadi tantangan yang akan mempengaruhi kepentingan, keamanan dan pertahanan hingga stabilitasnya di kawasan.

Adanya kekhawatiran mengenai ancaman keamanan yang diakibatkan oleh *returnees* di negaranya, maka kerajaan Maroko

menerapkan berbagai kebijakan. Faktor kepentingan dan keamanan negara yang bersifat vital mengharuskan Maroko mengeluarkan dua kebijakan untuk merespon FF *returnees* dari konflik Suriah. Pertama, yaitu kebijakan *hard approach* melalui peradilan pidana dan kerangka hukum untuk mengadili *returnees* yang terbukti terlibat dalam aktifitas terorisme, dan kedua yaitu kebijakan *soft approach* yang diimplementasikan ke dalam kebijakan luar negeri Maroko melalui berbagai kerja sama internasional.

Kerja sama yang dilakukan oleh Maroko dalam berbagi informasi (*sharing information*), melakukan lokakarya dan pertemuan tingkat tinggi dalam forum regional, mengembangkan peradilan pidana dalam kerangka hukum *counterterrorism* serta menerapkan *best practices* dengan negara Indonesia serta dalam forum regional (UNODC ROMENA) dan organisasi internasional (GCTF) merupakan tindakan Maroko dalam menangani FF *returnees* yang kembali dari Suriah. Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Maroko dalam kebijakan luar negerinya ditujukan guna mengamankan kepentingannya dalam menjaga stabilitas di kawasan Afrika sekaligus mengamankan hubungannya dengan Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Modul Pengetahuan Dasar: Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Bogor: BNPT, 2021, hal 72.
- Bakker, Edwin and Mark Singleton. "Foreign Fighters in the Syria and Iraq Conflict: Statistics and Characteristics of a Rapidly Growing Phenomenon." 2016, hal 13, [https://doi.org/10.1007/978-94-6265-099-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-6265-099-2_2).
- Bakry, Umar Suraydi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. 62.
- Berrada, Kathya Kenza. "Morocco's Response to Foreign Terrorist Fighters: Tighter Security and Deradicalisation." (2019): 27, [www.jstor.org/stable/resrep21453.6](http://www.jstor.org/stable/resrep21453.6).
- Botha, Anneli. *Terrorism in the Maghreb: The Transnationalisation of Domestic Terrorism*. 2008. Institute for Security Studies, hal 143, <https://issafrica.org/chapter-5-north-african-involvement-in-transnational-terror-networks>.
- Byman, Daniel. "The Homecomings: What Happens When Arab Foreign Fighters in Iraq and Syria Return?" *Studies in Conflict & Terrorism* (2015): 5.
- Counter Extremism Project. *Morocco: Extremism and Terrorism*. 2020. <https://www.counterextremism.com/countries/morocco-extremism-and-terrorism/report>.
- Donnelly, Maria Galperin , Thomas M Sanderson and Zack Fellman. *Foreign Fighters in History*. Washington. 2017, hal 3-4, <https://www.jstor.org/stable/resrep23304>.
- GCTF. "Initiative on Improving Capabilities for Detecting and Interdicting Terrorist Travel through Enhanced Terrorist Screening and Information Sharing Third Regional Workshop." GCTF Report. 2019, <https://www.thegctf.org/What-we-do/Initiative-Activities/Detail/ArtMID/842/ArticleID/101/Initiative-on-Improving-Capabilities-for-Detecting-and-Interdicting-Terrorist-Travel-through-Enhanced-Terrorist-Screening-and-Information-Sharing-Third-Regional-Workshop>.
- GCTF. "Rabat – Washington Good Practices on the Prevention, Detection, Intervention and Response to Homegrown Terrorism." GCTF Report. 2018, [https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2018/GCTF-Rabat-Washington-Good-Practices\\_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122245-707](https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2018/GCTF-Rabat-Washington-Good-Practices_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122245-707).
- GCTF "The Hague – Marrakech Memorandum on Good Practices for a More Effective Response to the FTF Phenomenon." GCTF Report. 2016, <https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework>

Documents/2016 and before/GCTF-The-Hague-Marrakech-Memorandum-ENG.pdf?ver=2016-09-01-150615-977.

- Hoffman, Adam and Marta Furlan. "Challenges Posed by Returning Foreign Fighters." 2020. *Programme on Extremism*, hal 10, <https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs5746/files/Challenges%20Posed%20by%20Returning%20Foreign%20Fighters.pdf>.
- Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, 1983.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Malet, David. "Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflict." (2009): 9.
- Masbah, Mohammed. "Moroccan Fighters in Syria." 2014. *Endowment for International Peace*. 10 Februari 2024.
- Masbah, Mohammed. "Moroccan Foreign Fighters: Evolution of a Phenomenon, Promotive Factors, and the Limits of Hardline Policies." (2015): 1.
- Masbah, Mohammed. "Transnational Security Challenges in North Africa: Moroccan Foreign Fighters in Syria 2012-2016." *Middle Eastern Studies* (2019): 183-184.
- Pramudiyani, Yashinta Difa. "Indonesia dan Maroko Kerja Sama Menanggulangi Terorisme." 2019. *ANTARA NEWS*. 22 Juni 2024, <https://www.antaranews.com/berita/1135563/indonesia-dan-maroko-kerja-sama-menanggulangi-terorisme>.
- Security Assessment in North Africa. "There and Back: Trajectories of North African Foreign Fighters in Syria." 2015, <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-SANA-IB3-Foreign-Fighters.pdf>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- UNODC. "Morocco - A Thriving Partnership in Support of the Rule-of-Law, Justice and Health." 2019, <https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2019/February/morocco---a-thriving-partnership-in-support-of-the-rule-of-law--justice-and-health.html>.
- UNODC. "Reinforcing International Cooperation in the MENA Region to Address Returning and Relocating Foreign Terrorist Fighters." 2018,

<https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2018/July/reinforcing-international-cooperation-in-the-mena-region-to-address-returning-and-relocating-foreign-terrorist-fighters.html>.

Watanabe, Lisa. "The Next Steps of North Africa's Foreign Fighters." 2018. *ETH Zurich*. 10 Februari 2024, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.001.0001>.